

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2018**

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6, Telanaipura
JAMBI**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2019 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang ingin dicapai pada periode tahun 2019 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi hingga saat ini.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2019 diharapkan dapat dijadikan dasar dan pedoman bagi seluruh pengelola pendidikan di wilayah Provinsi Jambi dan sebagai acuan bagi unit-unit teknis dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam menyusun :

- a. Rencana Kegiatan.
- b. Kegiatan pembangunan lintas sektor bidang pendidikan.
- c. Kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan.

Mudah-mudahan rencana kerja ini dapat dipahami oleh seluruh jajaran pengelola pendidikan serta pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, sehingga bermanfaat dalam rangka melakukan upaya-upaya pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi.

Jambi, Maret 2018


KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Normatif Penyusunan	3
1.3 Sistematika	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	5
2.1 Gambaran Umum Organisasi	5
2.2. Pencapaian Kinerja Layanan	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi.....	15
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	17
3.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH	21
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	22-27
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	IPM Provinsi Jambi Menurut Provinsi di Sumatra tahun 2012 - 2016.....	10
Tabel 2	Capaian Kinerja Tahun 2017/2018	12
Tabel 3	Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi tahun 2017	14
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	17
Tabel 5	Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	11
Gambar 2	Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 3	Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Berdasarkan Jenis Golongan..	12
Gambar 4	Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	13
Gambar 5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi....	14
Gambar 6	Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jambi	16
Gambar 7	Jumlah Lembaga Pendidikan Tahun 2016	17
Gambar 8	Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2016.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah untuk lebih bersungguh-sungguh dalam membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta pemerintah yang bersih (*Clean Government*) di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tanah air. Perubahan yang dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik, dan administrasi publik, termasuk diantaranya upaya untuk membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan tersebut menyangkut dua aspek, yaitu aspek psiko-sosial dan aspek teknis-ekonomis. Aspek psiko-sosial diwujudkan dalam bentuk perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah, serta pembangkitan keberanian untuk berubah. Sementara itu aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja sebagai wujud perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal di atas, sejak tahun 1999, Pemerintah sudah menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah diperbaharui dengan Undang-

undang nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi tidak lepas dari tuntutan reformasi tersebut di atas. Untuk itu, bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rencana Kerja merupakan suatu kebutuhan dan keharusan. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai salah satu perangkat pemerintah Provinsi Jambi, di dalam menyusun rencana kerja diupayakan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019, mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Terlebih lagi kami juga mempedomani implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diantaranya mengatur tentang kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan PKLK yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi urusan Pemerintah Provinsi.

Rencana Kerja merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dan disusun dengan cara mengintegrasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Rencana Kerja memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya langkah-langkah antisipatif yang diorganisasikan secara sistematis agar hasilnya dapat diukur melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Kerja menggariskan arah kegiatan lembaga, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya utama untuk dapat merealisasikannya. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa rencana kerja yang mengabaikan realitas sumber daya, termasuk anggaran, seringkali tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang terencana seringkali tidak

responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan yang perlu diperhitungkan di masa mendatang. Perencanaan diperlukan untuk memandu proses penganggaran pembiayaan pembangunan, dan bukan sebaliknya.

1.2. Landasan Normatif Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 2019 disusun berdasarkan landasan berikut ini :

- A. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
- B. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
- C. Landasan Operasional, yaitu :
 - 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi.
 - 8. Peraturan Gubernur Jambi, nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika

Kerangka perumusan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan normatif penyusunan, sistematika penyusunan Rencana Kerja.

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Memberikan gambaran umum tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta langkah-langkah yang akan dan harus dilakukan guna menghadapi tantangan pendidikan serta isu-isu strategis yang berkembang seputar pendidikan di Jambi.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini akan dijabarkan mengenai visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada Bab ini Mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Bab V Penutup

Bab ini berisi ringkasan Rencana Kerja serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Kerja termaksud.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Organisasi

Secara umum, profil Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi tanggungjawab di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

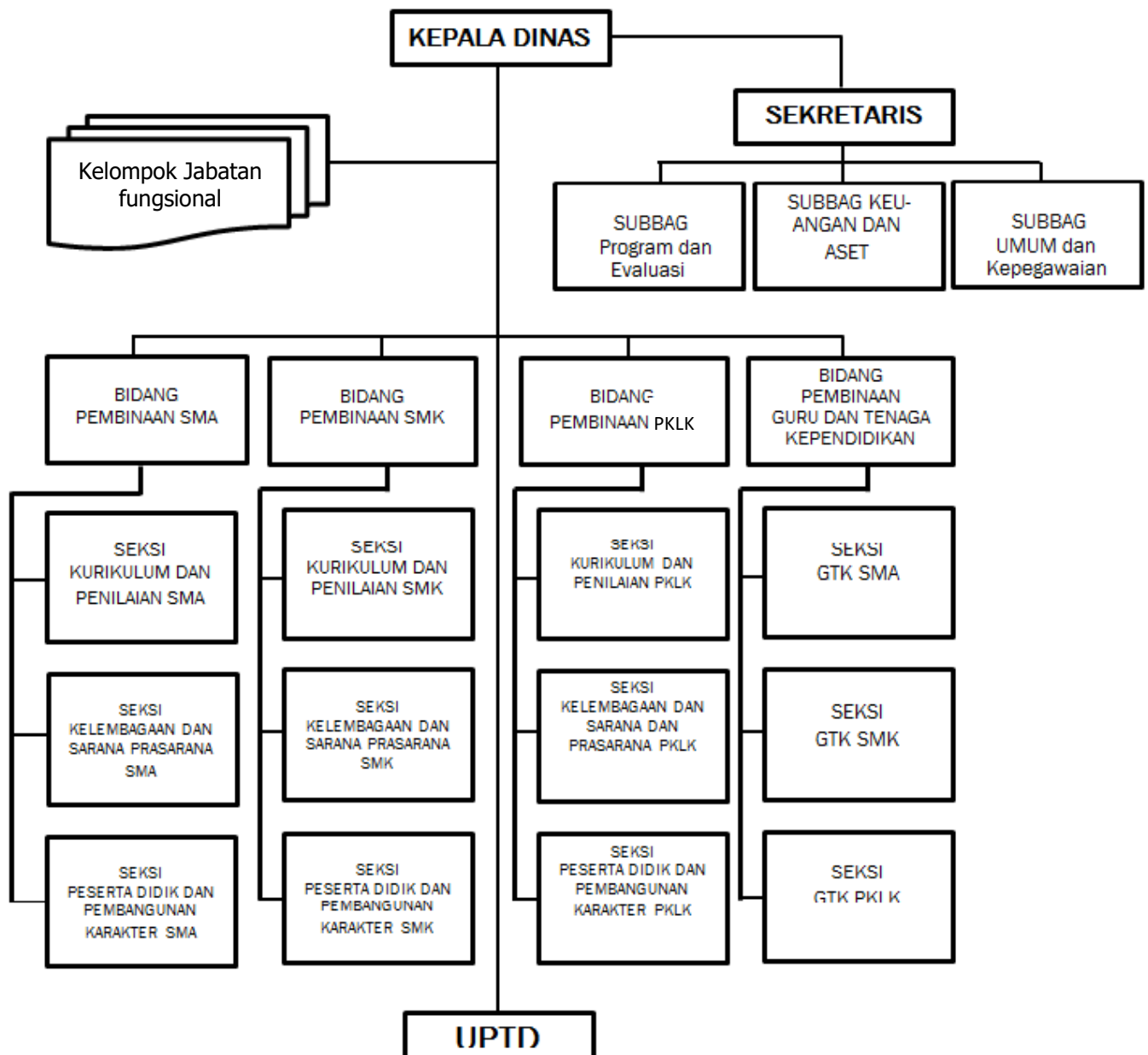
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut, personil sebagai sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan tersebut tersebar pada satuan unit kerja baik yang menduduki Eselon (pejabat) maupun Non Eselon.

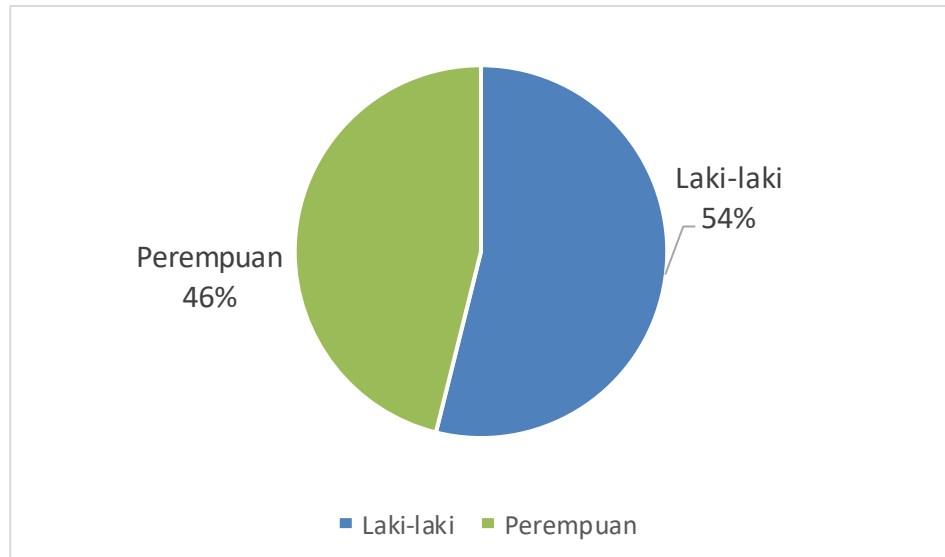
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

(Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Nomor 35 Tahun 2016)

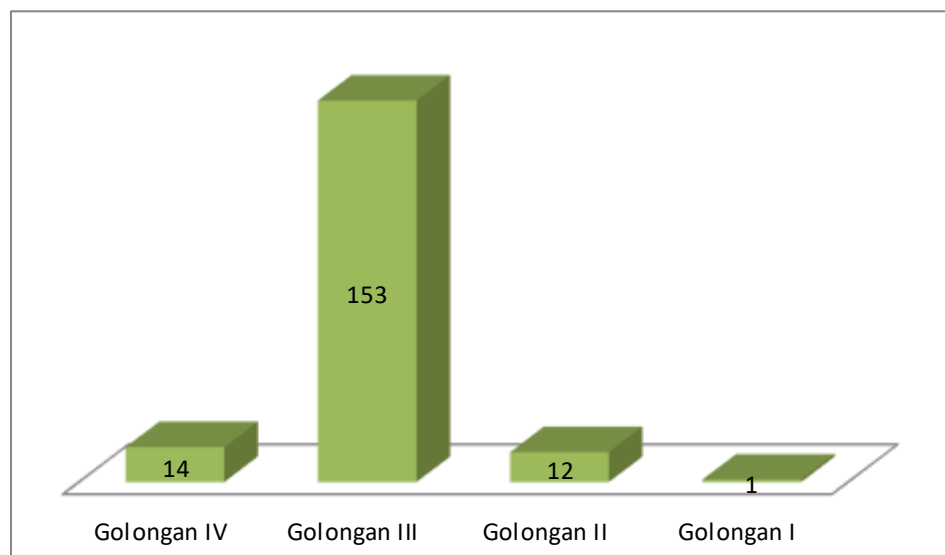


Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

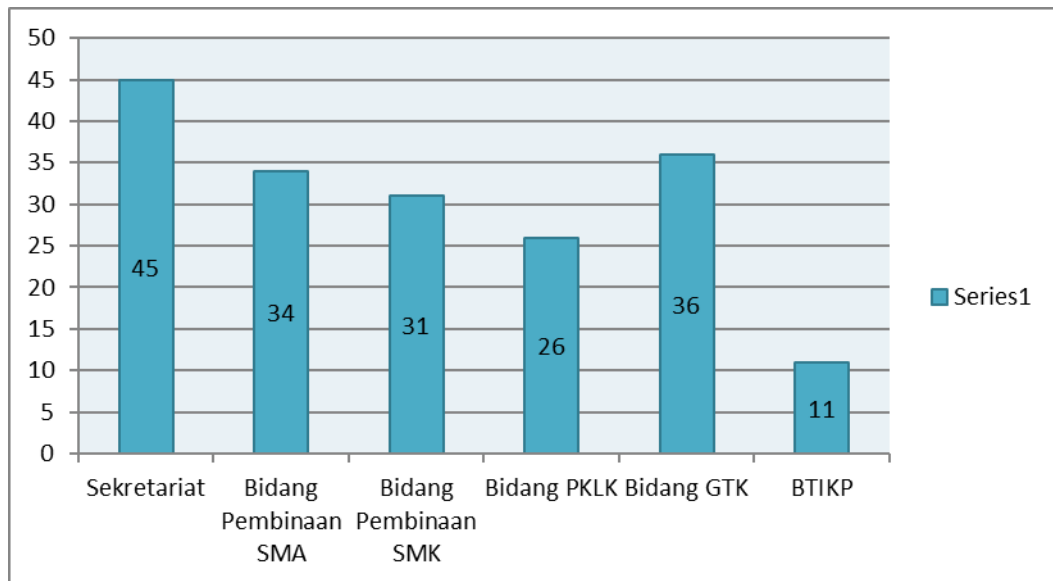
Organisasi sebagaimana yang tergambar di atas dilaksanakan oleh sumber daya yang ada, yaitu berupa karyawan yang tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi jambi, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Gambar 2. Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Berdasarkan Golongan

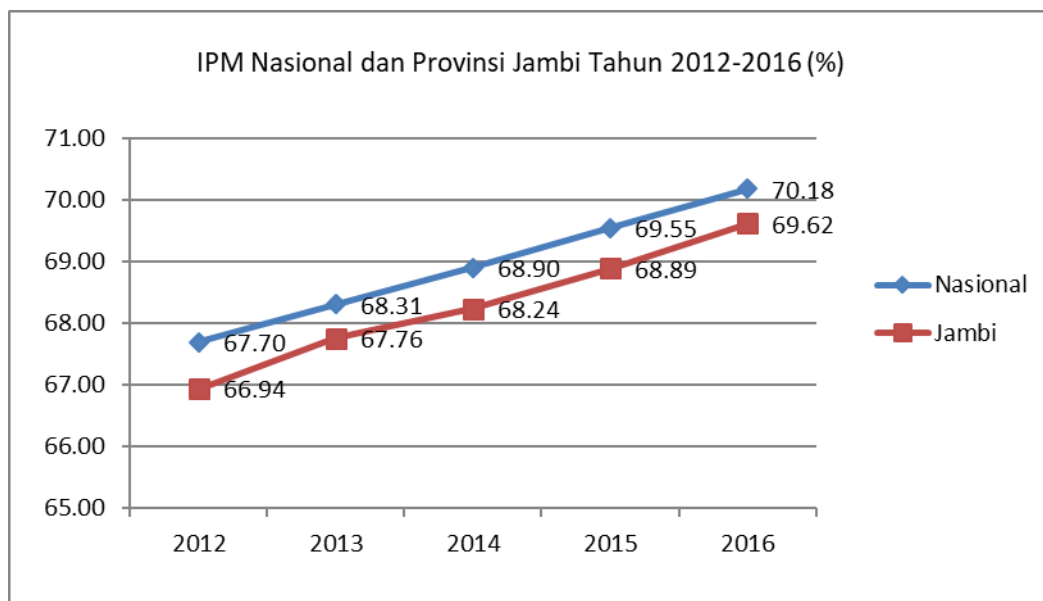


Gambar 4. Karyawan Dinas Pendidikan Provinsi

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 5. IPM Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2012-2016 dengan metode baru

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM Provinsi Jambi metode baru dalam waktu 5 tahun terakhir (2012-2016) meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 IPM Provinsi Jambi sebesar 66,94 meningkat menjadi 69,62 pada tahun 2016. Rata-rata peningkatan IPM Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir hanya 0.67%. Peningkatan rata-rata IPM Provinsi Jambi dalam lima tahun terakhir kurang lebih sama dari rata-rata peningkatan IPM nasional yang hanya

mencapai 0,61%. Adapun rincian peningkatan pertahun adalah 0.61% untuk peningkatan tahun 2013; 0,59% untuk peningkatan tahun 2014; peningkatan 0,65 % untuk tahun 2015 dan 0,63% peningkatan tahun 2016. Namun demikian IPM Provinsi Jambi selama 5 tahun belakangan ini masih dibawah IPM Nasional pada Tahun 2016 sebesar 70,18.

Tabel 1. IPM Provinsi Jambi Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2012-2016

No	Provinsi	IPM Metode Baru				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00
2	Sumatera Utara	67,74	68,36	68,87	69,51	70,00
3	Sumatera Barat	68,36	68,91	69,36	69,98	70,73
4	Riau	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20
5	Jambi	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62
6	Sumatera Selatan	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24
7	Bengkulu	66,61	67,50	68,06	68,59	69,33
8	Lampung	64,87	65,73	66,42	66,95	67,65
9	Kep. Bangka Belitung	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55
10	Kepulauan Riau	72,36	73,02	73,40	73,75	73,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

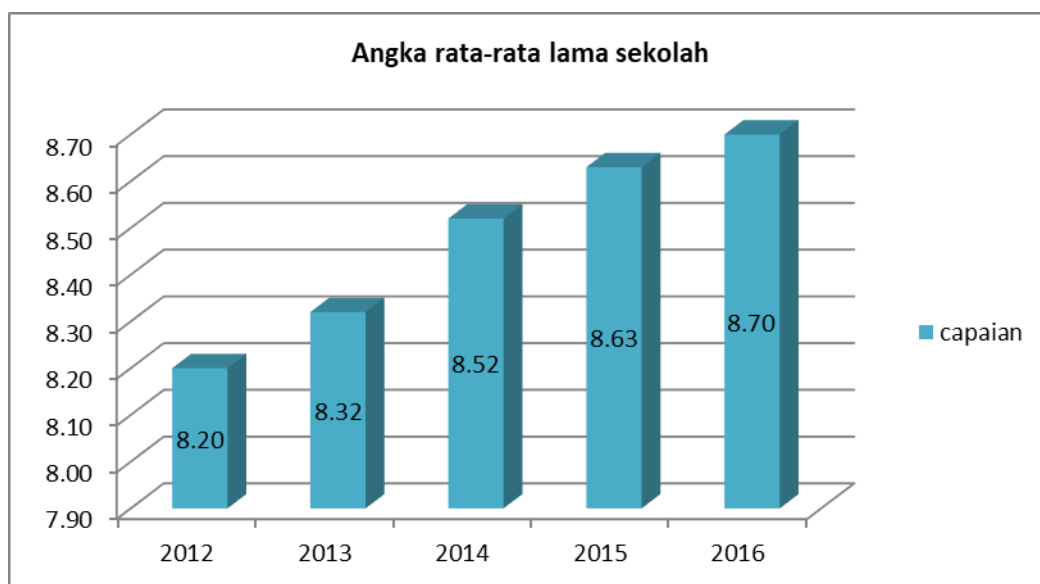
Oleh karena itu, rata-rata indeks kualitas manusia Provinsi Jambi masih jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional apalagi jika dibandingkan dengan IPM dari negara di Asia Tenggara dan negara lain di dunia. Peningkatan kualitas IPM melalui berbagai program pembangunan hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai terobosan dan percepatan sehingga kualitas sumberdaya manusia Jambi dapat mampu bersaing secara nasional dan global terutama dalam menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain se Sumatera sepanjang tahun 2012-2016, IPM Provinsi Jambi masih di bawah Provinsi lain kecuali Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Sedangkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Riau memiliki IPM yang lebih tinggi bandingkan Provinsi Jambi

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Pada periode tahun 2012-2016, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2012 masih 8,20 kemudian meningkat menjadi 8,70 tahun pada tahun 2016. Peningkatan persentase angka rata – rata lama sekolah di Provinsi Jambi dalam kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,13 persen tiap tahunnya.

Rata-rata peningkatan lama sekolah ini terhitung lambat sehingga diperlukan upaya yang tepat dan benar sehingga percepatan peningkatan lama sekolah bisa lebih baik. Perlunya upaya percepatan ini juga perlu segera diimplementasikan karena lama sekolah yang hanya 8,70 tahun berarti rata-rata penduduk Jambi hanya sampai di kelas 3 SLTP.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)

Gambar 6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Di samping hal di atas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada beberapa tabel-tabel berikut. Angka Partisipasi Kasar dan Murni menunjukkan kenaikan yang

cukup signifikan, begitu juga dengan penambahan jumlah lembaga pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

3. Capaian APK dan APM Pendidikan

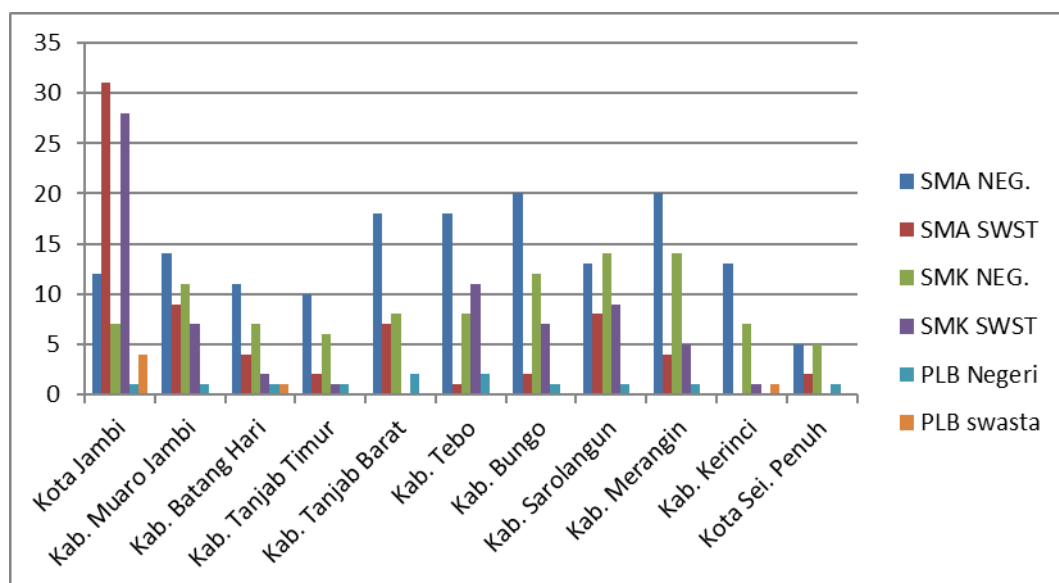
Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2016/2017

NO	Indikator	Target 2016	Capaian 2017
1	APK SMA	43.38	43.64
2	APK SMK	26.94	26.29
3	APK PKLK	22.29	23.18
4	APM SMA	18.66	30.43
5	APM SMK	12.56	18.36
6	APM PKLK	11.78	16.23

APK/APM adalah indikator makro yang menyatakan jumlah anak usia seekolah yang telah memperoleh layanan pendidikan

4. Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah

Gambar 7. Jumlah lembaga Pendidikan 2016



Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2016/2017 diperoleh data bahwa kondisi objektif pendidikan di Provinsi Jambi pada jenjang Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah lembaga yang ada sebanyak 224 sekolah terdiri dari sekolah negeri sebanyak 155 unit dan sekolah swasta sebanyak 69, dengan menampung peserta didik sebanyak 75.652 siswa yang di asuh oleh sekitar orang Guru dan 5.412 dan Kepala Sekolah baik PNS maupun Non PNS, pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun pelajaran 2016/2017 terdapat lembaga SMK sebanyak 174 lembaga yang terdiri dari 101 SMK Negeri dan 73 SMK Swasta, dengan menampung peserta didik sebanyak 48.764 siswa, jumlah Guru sekitar 3.890 orang (Kepala Sekolah dan Guru) baik PNS dan Non PNS. Selain dari satuan pendidikan yang disebutkan di atas, di Provinsi Jambi juga terdapat Satuan Pendidikan yang menangani Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang terwadahi pada satuan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang pada tahun pelajaran 2016/2017 yaitu sebanyak 19 lembaga, dengan mengasuh peserta didik sebanyak 1.672 siswa. Lembaga-lembaga/Satuan Pendidikan tersebut perlu terus dirawat, diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya secara berkesinambungan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan yang direfleksikan melalui kerja keras untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Jumlah lembaga pendidikan menengah di Provinsi Jambi Tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi tahun 2017

No	Kab/Kota	SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta	PLB Negeri	PLB Swasta
1	Kota Jambi	12	31	6	30	2	4
2	Kab. Muaro Jambi	15	7	11	6	1	-
3	Kab. Batang Hari	11	4	8	2	1	-
4	Kab. Tanjab Timur	10	2	6	1	1	-
5	Kab. Tanjab Barat	18	8	9	1	2	-
6	Kab. Tebo	19	1	8	11	1	1
7	Kab. Bungo	19	3	13	7	1	-
8	Kab. Sarolangun	13	8	14	9	1	-
9	Kab. Merangin	20	3	14	5	2	-
10	Kab. Kerinci	13	-	7	1	-	1
11	Kota Sei. Penuh	5	2	5	-	1	-
JUMLAH		155	69	101	73	13	6

5. Kualitas Guru

Pada pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi seluruh guru se Indonesia pada tahun 2015, untuk kompetensi Pedagogik dan Profesional hasilnya belum memuaskan. Dari segi nilai perolehan nilai terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 40,82 menjadi 48,69, namun dari segi peringkat provinsi Jambi menurun dari peringkat 21 menjadi peringkat 22 dari 34 Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

HASIL UJI KOMPETENSI GURU PROVINSI JAMBI 2016



Gambar 8. Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2016

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi

Visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah "Tertib, Unggul, Tangguh, Adil dan Sejahtera" (Jambi Tuntas 2021). Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, melainkan dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jambi serta stakeholders pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, misi yang ditetapkan tersebut mengisyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk memberikan kebersamaan langkah dalam mencapai tujuan perlu kiranya dirumuskan nilai-nilai instansi yang akan dianut bersama. Nilai-nilai ini harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan terkait erat dengan kegiatan pelayanan yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada stakeholder/masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai tersebut bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai luhur lainnya. Berikut nilai-nilai luhur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

1. Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki

kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspons dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses yang terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana penunjang yang baik, tepat dan memadai.

Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil. Di samping itu, kapabilitas yang tinggi tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan integritas moral/etika untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak. Selain itu, organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3. Kemitraan

Di dalam era demokrasi yang sedang berkembang saat ini, pola-pola kerja kemitraan perlu dikembangkan dan diupayakan

menghindarkan diri dari pola-pola lama yang menggunakan pendekatan kewenangan (*power approach*) ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan stakeholder (*stakeholder oriented approach*), sehingga terjalin hubungan yang harmonis/positif dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, Jajaran Kementrian Agama dan stakeholders pendidikan lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan adalah untuk mendukung pencapaian misi kedua Pembangunan Daerah, yaitu **meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamais dan berkesetaraan gender**, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 4 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	APM SMA	44,63%	45,56%	46,53%	48,54%	50,68%	52,98%
			APK SMA	53,19%	53,30%	55,46%	57,85%	60,41%	63,15%
			APM SMK	25,17%	26,20%	27,18%	27,13%	27,20%	27,98%
			APK SMK	30,01%	30,98%	31,95%	31,74%	31,42%	30,98%
			Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah	NA	NA	20%	22%	24%	26%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMA)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Angka melanjutkan ke PT. Akreditasi 'B' (SMK)	42,30%	45,47%	48,88%	52,55%	56,49%	60,73%
			Tingkat Kelulusan SMA	99%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%
			Tingkat Kelulusan SMK	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%	99,5%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase tamatan SMK yang bekerja	35%	40%	45%	50%	55%	60%
			Persentase Guru yang Bersertifikasi	37,49%	40,30%	43,32%	46,57%	50,06%	53,81%

3.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya serta memperhatikan kekuatan/ kelemahan yang dimiliki dan peluang-peluang/ ancaman yang ada, selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun mendatang. Strategi merupakan cara mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntut pencapaian tujuan dan visi organisasi pada akhirnya.

1. Strategi

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan Pendidikan Menengah

2. Kebijakan

- Meningkatkan persentase guru bersertifikat
- Meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi berakreditasi baik melalui peningkatan SPM bidang pendidikan

3. Program dan Kegiatan Indikatif

- Program Pendidikan SMA dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - APM SMA
 - APK SMA
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMA
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
 - Persentase Guru yang bersertifikasi

- c. Program Pendidikan SMK dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
- APM SMK
 - APK SMK
 - Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B"
 - Tingkat Kelulusan SMK
 - Persentase tamatan SMK yang bekerja
- d. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dengan indikator sasaran kinerja, yaitu :
- Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Melalui Pendidikan			
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah.	a) Meningkatkan persentase guru bersertifikat	Program Pendidikan SMA	• APM SMA • APK SMA • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMA
	b) Meningkatkan persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi berakreditasi baik melalui peningkatan SPM bidang pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Persentase guru yang bersertifikat
		Program Pendidikan SMK	• APM SMK • APK SMK • Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi "B" • Tingkat Kelulusan SMK • Persentase tamatan SMK yang bekerja
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	• Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah

Tabel 5 : Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setiap organisasi menghadapi lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Perhatian terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi tetapi pengaruh tersebut pada umumnya di luar kendali organisasi.

Program merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan mengacu pada Kebijakan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 dan kebijakan-kebijakan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, serta mempedomani implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan PKLK.

Di samping itu untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, berpedoman juga pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Jambi 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 (pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010).

Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Program dan Kegiatan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2019, tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan manajemen organisasi, sekurang-kurangnya melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.